

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Analisis permasalahan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah diuraikan pada Bab 2 (gambaran umum kondisi daerah). Berdasarkan uraian gambaran umum kondisi daerah teridentifikasi 30 (tiga puluh) permasalahan pembangunan adalah sebagai berikut :

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data indikator Produk Domestik Bruto (PDRB) tingkat Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar 6,43 persen dengan PDRB 1.6 T sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 6,35 persen, 6,23 persen, 6,12 persen dan 6,20 persen. Kenaikan angka PDRB Kota Tidore Kepulauan salah satunya dipengaruhi oleh pemberlakuan System Neraca Nasional (SNA) yang disertai dengan penambahan sektor lapangan usaha dari 9 (sembilan) Sektor Usaha menjadi 17 sektor lapangan usaha.

Disisi lain, perlu dilakukan strategi pelibatan sektor swasta melalui investasi karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan yaitu investasi pembangunan oleh pihak swasta yang masih sangat rendah. Berdasarkan analisa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 teridentifikasi lapangan usaha yang kurang berkontribusi terhadap PDRB yakni Real Estate; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta pertambangan/penggalan.

4.1.2 Bidang Pendidikan

- 1) Masih kurangnya prasarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran
- 2) Belum merata tenaga guru bidang studi di wilayah Kota Tidore Kepulauan
- 3) Masih ada pengalihan tenaga guru dari jabatan fungsional ke jabatan struktural

4.1.3 Bidang Kesehatan

- 1) Terbatasnya prasarana kesehatan khususnya di puskesmas dan poskesdes/polindes
- 2) Masih kurangnya alat kesehatan Rumah Sakit untuk menunjang pelayanan rujukan
- 3) Delapan puluh persen (80%) puskesmas yang belum terakreditasi
- 4) Kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat masih rendah

4.1.4 Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- 1) Masih adanya kegiatan galian C yang belum memiliki ijin
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah tentang RDTR
- 3) Masih terjadinya abrasi pantai pesisir daratan Oba dan Tidore

4.1.5. Bidang Pekerjaan Umum

- Belum adanya Masterplan dan DED Utilitas Perkotaan

4.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan

- 1) Belum ada tenaga fungsional perencana
- 2) Sinergitas antar SKPD masih lemah

4.1.7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Jumlah lapangan olahraga khususnya lapangan bola tahun 2015 berjumlah 61 lapangan bola bila di dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 110.102 jiwa maka presentasi lapangan bola hanya sebesar 0.55%.
- 2) Jumlah Gelanggang/Balai Remaja pada tahun 2015 berjumlah 1 Gelanggang/Balai Remaja bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 110.102 jiwa maka presentasi hanya 0.01 %.
- 3) Belum optimalnya pembinaan keolahagaan dan atlit-atlit berbakat serta upaya pembibitan bakat-bakat olahraga
- 4) Belum optimalnya pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan

4.1.8. Bidang Penanaman Modal

- 1) Masih 16 investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi
- 2) Belum memiliki Perda tentang Investasi dan Penanaman Modal.

4.1.9. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1) Bidang Koperasi dan UKM

- a. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh sebagian besar KSP/USP koperasi belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Kualitas SDM pelaku usaha mikro dan kecil pada umumnya masih rendah baik dari aspek teknis maupun manajerial
- c. Keterbatasan akses PUMK kepada sumber daya produktif meliputi akses permodalan, pasar, teknologi dan informasi
- d. Skala usaha masih bersifat makro

2) Bidang Perdagangan

- a. Toko modern di Kota Tidore Kepulauan belum memiliki izin usaha toko modern (IUTM)
- b. Sarana pergudangan milik swasta tidak terdaftar (TDG)
- c. Belum terjaminnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok disebabkan Kota Tidore Kepulauan belum tersedia distributor dan agen bahan pokok dan barang penting lainnya
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pedagang akan bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa serta penggunaan produk kosmetik
- e. Belum teridentifikasi komoditi/produk ekspor yang menjadi unggulan daerah Kota Tidore Kepulauan
- f. Belum tersedianya standarisasi alat ukur, takar dan timbangan

3) Bidang Perindustrian

- a. Pelayanan izin usaha dan pendaftaran industri kecil dan menengah belum dilakukan secara optimal
- b. Kegiatan usaha industri yang dilaksanakan pada umumnya bersifat sambilan
- c. Kualitas produk kerajinan seperti gerabah dan anyaman-anyaman masih kasar dan kurang inovatif
- d. Harga jual yang ditetapkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan harga jual produk yang sama dari daerah lain
- e. Rendahnya kualitas SDM dan kewirausahaan pelaku IKM

4.1.10. Bidang Kependudukan Catatan Sipil

- Pelimpahan kewenangan ke UPTD belum maksimal

4.1.11. Bidang tenaga Kerja

- Belum optimalnya Pelatihan ketrampilan bagi tenaga fungsional dan masyarakat

4.1.12. Bidang Ketahanan Pangan

- Belum maksimalnya pengembangan sentra produksi

4.1.13. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Kurangnya tenaga penyuluh KB yang merupakan pegawai ASN, sehingga dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan konsultasi bagi pasangan usia subur sngat terbatas.

4.1.14. Bidang Perhubungan

- 1) Minimnya sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan
- 2) Terbatasnya sarana prasarana transportasi yang memadai baik darat maupun laut
- 3) Belum adanya pelabuhan berskala peti kemas

4.1.15. Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Minimnya jaringan telekomunikasi
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

4.1.16. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- Pelayanan publik masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena belum semua SKPD menyusun SOP dan SPM yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat

4.1.17. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas

- 1) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur Desa
- 2) Belum meratanya pemahaman perencanaan tingkat Desa
- 3) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha

4.1.18. Bidang Sosial

- 1) Data kemiskinan masih berbeda antar instansi pemerintah
- 2) Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2015 sebanyak 159 orang.

4.1.19. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan potensi kebudayaan
- 2) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing
- 3) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
- 4) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.
- 5) Belum ada pengembangan investasi di bidang Pariwisata
- 6) Masih minimnya pengembangan sumberdaya manusia Pariwisata
- 7) Kurangnya pengembangan sanggar seni dan budaya
- 8) Kurang optimalnya penataan kawasan cagar budaya
- 9) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
- 10) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda

4.1.20. Bidang Statistik

- 1) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik
- 2) Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.

4.1.21. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

- Rendahnya sosialisasi tentang peran dan fungsi kearsipan dan perpustakaan

4.1.22. Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Masih rendahnya Tata Niaga Hasil Perikanan
- 2) Tingginya biaya operasional kegiatan penangkapan ikan
- 3) Lemahnya SDM nelayan yang belum memadai
- 4) SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan
- 5) Status pelabuhan pendaratan ikan masih PPI
- 6) Masih adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal dan merusak lingkungan

- 7) Jarak penangkapan ikan semakin jauh
- 8) Belum maksimalnya upaya budidaya ikan
- 9) Maraknya praktek IUU fishing karena rendahnya kesadaran masyarakat

4.1.23. Bidang Pertanian

- 1) Komoditi unggulan wilayah Kota Tidore Kepulauan belum ditetapkan
- 2) Pengolahan pasca panen produksi pertanian yang masih rendah
- 3) Tingginya harga saprodi dan alsintan
- 4) Pembentukan pusat pengembangan produksi Pertanian belum tersedia

4.1.24. Perkebunan

- 1) Masih kurangnya peremajaan tanaman perkebunan
- 2) Kurangnya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
- 3) Lemahnya control pemerintah terhadap pemasaran hasil produksi

4.1.25. Peternakan

- 1) Pola pengembangan peternakan oleh masyarakat belum maksimal
- 2) Rendahnya sarana dan prasarana Peternakan
- 3) Rendahnya produksi daging dan telur
- 4) Belum optimalnya pengelolaan usaha peternakan

4.1.26. Bidang Kehutanan

- 1) Penebangan hutan yang masih belum terkendali
- 2) Ketersediaan sumberdaya petani hutan di wilayah Kota Tidore Kepulauan masih kurang
- 3) Konflik pengelolaan kawasan hutan negara dan hutan masyarakat

4.1.27. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- Belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan tambang

4.1.28. Bidang Perindustrian

- 1) Inovasi produk masih rendah
- 2) Pemberdayaan industri kecil dan menengah masih rendah

4.1.29. Bidang Perdagangan

- Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi

4.1.30. Bidang Sarana dan Prasarana Umum

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Selanjutnya analisis SWOT terhadap kondisi Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut :

4.2.1. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Memiliki 13 Pulau (4 pulau yang berpenghuni dan 9 Pulau tidak berpenghuni)
- 2) Kondisi keamanan wilayah yang kondusif
- 3) Memiliki potensi sumber daya alam yang memadai baik laut maupun darat
- 4) Memiliki kawasan belum terbangun (lahan tidur) yang masih cukup luas
- 5) Memiliki usia produktif yang cukup tinggi
- 6) Adanya lembaga adat dan budaya karena Kota Tidore sebagai daerah kesultanan
- 7) Gotong royong yang masih kuat
- 8) Memiliki peninggalan sejarah
- 9) Tersedianya dokumen perencanaan

4.2.2. Kelemahan

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung lambat
- 2) Masih kurangnya tenaga dokter khususnya dokter spesialis
- 3) Masih minimnya sarana prasarana kesehatan
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung disektor pariwisata
- 5) Masih terdapatnya penduduk miskin
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
- 7) Masih terbatas sarana prasarana transportasi yang memadai baik darat maupun laut
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas pelayanan publik
- 9) Masih minimnya ketersediaan ruang publik
- 10) Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang masih kurang(dalam hal perijinan)
- 11) Penyebaran tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan belum merata
- 12) Masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di daratan Halmahera
- 13) Masih rendahnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknolgi dalam mengolah hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan
- 14) Belum adanya pelabuhan berskala peti kemas
- 15) Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil
- 16) Belum ada indikator yang jelas dalam pemberian bantuan kepada petani dan nelayan
- 17) Infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai sehingga memperlambat aktivitas perekonomian
- 18) Masih lemahnya koordinasi lintas sektor
- 19) Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan
- 20) Fasilitas dan sumber daya manusia untuk pemadam kebakaran masih kurang
- 21) Kegiatan galian C yang masih liar sehingga menimbulkan degradasi lingkungan
- 22) PLTU Rum yang sampai saat ini belum beroperasi
- 23) Kurangnya minat investor untuk berkiprah dalam pembangunan ekonomi

4.2.3. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Beasiswa bagi PNS untuk peningkatan sumber daya aparatur
- 2) Tersedianya lembaga dan aparatur yang dapat menjaga keberlangsungan stabilitas keamanan
- 3) Perda Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (pasal 11 ayat 3 huruf j, pasal 15 ayat 3 huruf a, pasal 70 ayat 3 huruf a)
- 4) Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2033
- 5) Pemekaran wilayah Kecamatan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
- 6) Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sofifi
- 7) Pembangunan Kota Baru Sofifi

4.2.4. Ancaman (*Threat*)

- 1) Masuk dalam kategori daerah rawan bencana
- 2) Semakin berkurangnya luas wilayah Kota Tidore Kepulauan
- 3) Revisi Dokumen Rencana Tata Ruang
- 4) Persaingan sumberdaya manusia global
- 5) Pengaruh budaya asing yang berdampak buruk pada masyarakat
- 6) Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam akibat perubahan iklim

Dengan memperhatikan arahan pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi di atas, serta memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan, analisis SWOT dan keadaan wilayah perkembangan Kota Tidore Kepulauan selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan potensi pengembangan Kota Tidore Kepulauan di masa depan, maka isu-isu strategis Kota Tidore Kepulauan selama lima tahun kedepan dirumuskan dalam 18 (delapan belas) isu strategis Kota Tidore Kepulauan yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan
2. Ketersediaan Infrastruktur laut maupun darat yang Utilitas Perkotaan
3. Perumahan dan Permukiman

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Kualitas Lingkungan Hidup
6. Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Pengembangan Pertanian
8. Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah untuk pertumbuhan ekonomi
9. Industri Perdagangan, UMKM dan Koperasi
10. Kesempatan Kerja
11. Pemberdayaan Masyarakat
12. Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
13. Pemuda dan Olahraga
14. Kesejahteraan Sosial
15. Pariwisata, Seni dan Budaya
16. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
17. Penanggulangan Bencana
18. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik